Working Paper Sajogyo Institute No. 17 | 2014



MP3EI: Cerita (Si)Apa? Mengapa Sekarang?

Noer Fauzi Rachman
Dian Yanuardy

Working Paper Sajogyo Institute No. 17 | 2014

MP3EI:
Cerita (Si)Apa? Mengapa Sekarang?

Oleh

Noer Fauzi Rachman

Dian Yanuardy

Sajogyo Institute

Tentang Sajogyo Institute

Sajogyo Institute adalah lembaga nirlaba independen yang bergerak dalam bidang penelitian, pendidikan dan latihan, dan advokasi kebijakan untuk mencapai cita-cita keadilan agraria, kemandirian desa-desa, dan kedaulatan warganegara perempuan dan laki-laki atas tanah air Indonesia. Sajogyo Institute merupakan bagian dari Yayasan Sajogyo Inti Utama yang didirikan pada tanggal 10 Maret 2005. Prof. Sajogyo, yang dikenal sebagai peletak dasar ilmu sosiologi pedesaan Indonesia, merupakan salah satu pendiri Yayasan dan pemberi wakaf tanah yang berada di Jl. Malabar 22, Bogor, Jawa Barat, 16151, dengan keseluruhan bangunan rumah beserta isinya.

Sajogyo Institute's Working Paper No. 17 | 2014

© 2014 Sajogyo Institute.
Penyebarluasan dan penggandaan dokumen ini diperkenankan sepanjang untuk tujuan pendidikan dan tidak digunakan untuk tujuan komersial.

Usulan penulisan dalam Daftar Pustaka:
Rachman, Noer Fauzi dan Dian Yanuardy. 2014. "MP3EI: Cerita (Si)Apa? Mengapa Sekarang?". Kertas Kerja Sajogyo Institute No. 17/2014. Sajogyo Institute, Bogor.

ISSN Digital : -
ISSN Cetak : -

Sumber foto sampul depan: ERIA Regional Network Forum on "Economic Integration in East Asia and Strategy for SME Development" di Fukuoka, Jepang. Sumber:http://www.eria.org/press_releases/FY2012/02/eria-and-fukuoka-prefecture-in-japan-organize-eria-regional-network-forum-in-fukuoka-on-economic-int-1.html

Working Paper ini menggambarkan pandangan pribadi penulis, bukan pandangan dan kebijakan Sajogyo Institute. Penulis lah yang bertanggungjawab terhadap keseluruhan isi Working Paper ini.

Jl. Malabar No. 22, Bogor,
Jawa Barat 16151
Telepon/Fax : (0251) 8374048
Email: eksekutif.sains@gmail.com
Situs maya: http://www.sajogyo-institute.or.id

Daftar Isi

I. Pendahuluan — 1
II. Asal Muasal MP3EI — 5
III. Bagaimana MP3EI Bekerja — 15
IV. Catatan Akhir: Menghapus Warisan Buruk Rejim Sekarang — 29
Daftar Pustaka — 31

Daftar Tabel

Tabel 1. Inisator Pelaksanaan Program Investasi di wilayah ASEAN — 13
Tabel 2. Penyesuaian regulasi yang dilakukan oleh pemerintah — 17
Tabel 3: Kategori kawasan ekonomi di Indonesia — 22
Tabel 4. Proyek Infrastruktur dengan Skema PPP 2013-2015 — 25
Tabel 5. Proyek Infrastruktur Prioritas — 26

Daftar Gambar

Gambar 1: Lembaga-lembaga penelitian jaringan ERIA — 10
Gambar 2: CADP. Sumber: ERIA (2010) — 12
Gambar 3: kerangka berpikir CADP tentang konektivitas — 13
Gambar 4. Rencana Proyek Pembangunan Pelabuhan Cilamaya — 28

Untuk mempercepat pembangunan, pada Mei 2011, kami meluncurkan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025 (MP3EI). Dalam waktu 14 tahun ke depan, kami menargetkan 460 miliar US $ untuk investasi di 22 kegiatan ekonomi utama, yang terintegrasi dalam delapan program, yang mencakup pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata dan telekomunikasi. Karena itu, Master Plan ini memberikan kesempatan besar bagi investor internasional. Akhirnya, dalam kapasitas saya sebagai Kepala Pemasaran Perusahaan Indonesia (chief salesperson of Indonesia Inc.), saya mengundang anda untuk memperbesar bisnis dan kesempatan investasi di Indonesia.

(Pidato Pembukaan Presiden Republik Indonesia pada pertemuan Chief Executife Officer [CEO] APEC, Nusa Dua, Bali 6 Oktober 2013. penekanan dari penulis)

I.
Pendahuluan

Di hadapan 1.200 pejabat eksekutif perusahaan dan berbagai kepala negara acara Konferensi Tingkat Tinggi Forum Kerjasama Asia Pasifik (APEC) 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menutup pidato pembukaannya dengan pernyataan yang lugas dan terang-terangan: bahwa dirinya adalah Kepala Pemasaran dari Perusahaan Indonesia. Untuk mendukung itu, maka pemerintahannya telah menyiapkan desain megaproyek pembangunan yang disebut dengan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 –2025.

Pada 6 Mei 2011, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 32 tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011–2025, yang disingkat dengan MP3EI[1]. Bersamaan dengan Perpres itu diterbitkan juga suatu buku setebal 210 halaman, berisi tentang strategi, tata cara, dan protokol dan beragam rancangan megaproyek pembangunan.

Segera setelah MP3EI diluncurkan, perusahaan-perusahaan raksasa skala dunia dan kepala negara-negara industri maju menyambut kehadiran MP3EI. Perusahaan-perusahaan besar yang tergabung dalam China Top 500 Foreign Trade Enterprise, misalnya, berminat untuk berinvestasi di bidang manufaktur dan pertambangan.[2]

1 Pada hari Jum'at, 27 Mei 2011, MP3EI diluncurkan dalam suatu acara yang megah di Hotel Jakarta Convention Center. Peluncuran Master Plan itu dihadiri oleh Kepala Lembaga Tinggi Negara, Pimpinan Partai Politik, Para Menteri/Kepala LPNK, Gubernur, Ketua DPRD Propinisi, Komite Ekonomi Nasional, Komite Inovasi Nasional, Bupati/Walikota, Kedutaan dan Lembaga Internasional, Kamar Dagang Indonesia, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Dunia Usaha, BUMN, serta Universitas.

2 Club Top 500 dibentuk oleh para pengusaha, ahli ekonomi dan keuangan, diplomat dan politisi Republik Rakyat Cina yang memiliki pengaruh dalam perdagangan dan investasi luar negeri. Saat ini Club Top 500 beranggotakan sekitar 1.000 anggota, dengan pendapatan 53% dari perdagangan luar negeri dan menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi Cina. Melalui Club Top 500 para pengusaha terkemuka Cina membangun strategi global yang kuat, dan membantu pengusaha-pengusaa Cina untuk dapat bersaing di dunia internasional. Menurut Deputi Promosi Investasi Badan Kordinasi Penanaman Modal Himawan Prayoga, terdapat 5 bidang usaha di Indonesia yang dapat dikerjakan para investor Cina

Pemerintah dan pengusaha asal Jepang juga merupakan pendukung setia bagi Master Plan ini. Selain berinvestasi di bidang infrastruktur, pemerintah Jepang berkomitmen untuk mewujudkan 5 (lima) *flagship projects* dari 18 *fast-track projects* yang terdapat dalam skema *Metropolitan Priority Area* (MPA). Proyek-proyek tersebut antara lain adalah pengembangan sistem *Mass Rapid Transportation* (MRT) di Jakarta, pembangunan pelabuhan laut internasional di Cilamaya, perluasan dan pengembangan bandara Soekarno-Hatta, pembangunan *new academic research cluster* serta pembangunan fasilitas pengolahan limbah di Jakarta.[3] Sampai saat ini, Jepang telah mengucurkan bantuan sebesar 100 miliar yen (Rp 140 triliun), utamanya untuk *fast-track projects*. Tak ketinggalan, pemerintah Amerika Serikat memanfaatkan momentum ini dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang berjudul *Cooperation for the Development of Industrial Sectors to Support Infrastructure Projects*, yang akan mengucurkan investasi AS sebesar US$ 5 miliar ke Indonesia. Hingga saat ini, pemerintah terus mengadakan dan memanfaatkan berbagai forum pertemuan di luar negeri untuk menjual MP3EI pada pengusaha dan pemerintah Jerman, Asia, Australia dan Eropa.[4]

Di tengah gencarnya pemerintah menjalankan MP3EI belum terdapat suatu studi yang secara kritis membedah genealogi kebijakan MP3EI dan bagaimana MP3EI bekerja. Beberapa kajian yang telah dilakukan pada umumnya hanya mempermasalahkan kemampuan MP3EI mengatasi ketimpangan pembangunan antar wilayah atau hanya sekedar memaparkan hambatan-hambatan implementasi MP3EI[5]. Sementara kajian yang lain secara langsung memaparkan potensi dampak-dampak MP3EI terhadap masalah keselamatan rakyat, perampasan tanah, atau dampaknya terhadap buruh.[6] Tulisan ini pada dasarnya bersifat sebagai suatu studi pendahuluan (*preliminary study*) yang berupaya untuk menganalisa berbagai macam proses yang saling terkait dalam mendorong lahirnya MP3EI dan bagaimana negara membuat MP3EI bekerja, sembari berupaya memeriksa secara sekilas kondisi-kondisi di tempat proyek MP3EI dilaksanakan.

Dalam rangka tujuan tersebut, tulisan ini bertolak dari tiga pertanyaan utama: (1) Bagaimana proses-proses kebijakan MP3EI terbentuk? Secara lebih spesifik, tulisan ini berupaya untuk memeriksa mengapa MP3EI ada dan muncul? Mengapa sekarang? Bagaimana desain seperti MP3EI berhubungan dengan kecenderungan-kecenderungan desain internasional serupa di level regional?; (2) Bagaimana peran negara mengalami perubahan untuk membuat kebijakan MP3EI bekerja. Pertanyaan ini secara khusus berupaya untuk memeriksa trayektori dari perubahan kebijakan negara yang memfasilitasi aliran kapital selama masa akhir Orde Baru hingga Reformasi; dan bagaimana praktik dari aparatus negara untuk membuat MP3EI bekerja. Tulisan ini

---

ini, yaitu industri manufaktur, industri pengolahan hasil pertanian dan pertambangan; infrastruktur dan konstruksi; dan energi baru dan terbarukan. Dan guna membantu investasi, telah disiapkan serangkaian paket stimulus ekonomi, membuka kawasan ekonomi khusus, memberikan kepastian hukum, memberikan kemudahan proses perijinan dan memberikan insentif perpajakan yang menarik. http://ramadhan.detik.com/read/2013/07/05/125343/2293612/4/perusahaan-top-500-china-minat-investasi-di-indonesia, diakses pada 13 Januari 2014.

3 http://kp3ei.go.id/uploads_file/buletin/Bulletin_KORIDOR_Edisi_Perdana-2013.pdf, diakses pada 14 Januari 2014.

4 http://jakarta.usembassy.gov/news/pr_08092012.html, diakses pada 13 Januari 2014.

5 Sebagai misal adalah kajian yang dibuat oleh Strategic Asia (2012) dan Mudrajad Kuncoro (2013).

6 Lihat misalnya Siti Maemunah (2013) dan Muhamad Ridha (2013).

diharapkan dapat berkontribusi pada kajian tentang bagaimana MP3EI muncul dan bagaimana desain pembangunan itu bekerja.

II.
Asal-Muasal MP3EI

Krisis Kapital(is) dan Pergeseran Geografi Produksi

MP3EI bukan lahir semata-mata dari kreasi jenius rejim Susilo Bambang Yudhoyono. Setiap upaya untuk memahami desain pembangunan MP3EI akan kurang memadai, jika tak membacanya justru dari sudut pandang dinamika pergerakan kapital. Kapital adalah suatu proses dan cara produksi dimana uang mesti digerakkan untuk memperoleh uang yang lebih banyak (*Money-Commodity-More Money*). Dalam cara produksi kapitalis, proses itu tak bisa berhenti dan berlaku sekali saja, ia harus selalu merupakan proses akumulasi keuntungan yang tanpa henti (*endless accumulation*) dan harus selalu menghilangkan hambatan supaya proses akumulasi itu dapat mengalami pembesaran dan perluasan (*boundless accumulation*). Kapital juga merupakan relasi sosial, yaitu hubungan antara kelas kapitalis dan kelas buruh dalam suatu proses kerja dimana untuk memperoleh uang lebih banyak (laba), kelas kapitalis mengeksploitasi dan menghisap kelas buruh (de Angelis 2007: 37).

Tetapi, cara produksi kapitalis yang sedemikian itu selalu menghasilkan krisis, yang disebut dengan dengan krisis overakumulasi. Krisis bukan berarti ketiadaan uang atau barang, malahan, ia adalah kondisi dimana keberlimpahan uang dan barang terjadi. Krisis overakumulasi dapat tampil dalam berbagai bentuk yaitu: *overproduksi komoditas*, yaitu berlimpahnya dan berlebihnya barang-barang dagangan di pasar; *jatuhnya tingkat keuntungan*; *surplus kapital*, yaitu melimpahnya uang-kapital yang tidak dapat diinvestasikan kembali serta ketiadaan kesempatan bagi uang-kapital untuk memperoleh keuntungan dari proses produksi; *surplus tenaga kerja,* yaitu melimpahnya tenaga kerja yang tak dapat diserap dalam proses produksi dan atau berupa meningkatnya level eksploitasi tenaga kerja.

Salah satu krisis kapitalis yang berskala dunia dan paling terkemuka adalah Depresi Besar tahun 1930an. Krisis itu bermula di Amerika Serikat, setelah kejatuhan harga saham pada September 1929 yang berlanjut dengan hancurnya harga saham pada Oktober 1929. Sebagai efeknya, maka perolehan pajak, harga barang, tingkat keuntungan hingga pendapatan individu menjadi turun. Perdagangan internasional juga juga menurun hingga 50%, tingkat pengangguran karena pemutusan hubungan kerja di Amerika Serikat meningkat menjadi 50%, dan di beberapa negara lain mencapai 33%. Kota-kota besar penopang industri kapitalis sangat terpukul oleh krisis ini. Sektor-sektor utama industri seperti konstruksi, pertambangan, perkayuan, dan perkebunan mengalami *kemerosotan* parah. Pertanian dan wilayah pedesaan menderita karena harga-harga komoditas pertanian jatuh hingga 60%. Para petani pedesaan banyak yang menjual lahan dan rumahnya. Surplus komoditas dalam skala besar tak bisa dijual dan diserap oleh konsumen. Kelaparan dan pengangguran meruyak dimana-mana.

Depresi Besar bukanlah cerita akhir krisis kapitalis. Terdapat ratusan krisis kapital di seluruh dunia sejak tahun 1970an (Harvey 2010: 8). Krisis-krisis itu juga membuat sejumlah bank dan keuangan negara mengalami kebangkrutan. Rangkaian krisis itu menciptakan apa yang disebut oleh David Harvey, sebagai “masalah penyerapan surplus

kapital (*the capital surplus absorption problem*)". Selama kurun waktu 1973-1982, memang terdapat masalah serius dalam penyerapan surplus kapital dan surplus produksi barang dan jasa. Masalah absorpsi surplus kapital ini sejenak berhasil dipecahkan melalui industrialisasi di Cina pada tahun 1980an, namun tingkat keuntungan secara global kembali mengalami penurunan di era 1990an. Setelah masa itu, banyak uang yang kemudian disirkulasikan kembali dalam bentuk saham (Harvey, 2010: 28).

Krisis-krisis overakumulasi itu pada kenyataannya tidak membuat cara produksi kapitalis menjadi bangkrut atau hancur. *Krisis-krisis itu malahan selalu menjadi momen reorganisasi kapitalis dan terjadinya pergeseran geografi produksi utamanya ke wilayah-wilayah yang memungkinkan kapital untuk mencari profit yang lebih menguntungkan*. Perkembangan geografi kapitalis yang tidak merata memungkinkan kapital melakukan reorganisasi spasial: berpindah dan berekspansi dari satu tempat ke tempat lainnya. Sejak tigapuluh tahun terakhir, misalnya, pusat-pusat industri baja seperti Pittsburgh, Sheffield, Essen mengalami deindustrialisasi, sementara secara paralel pusat-pusat industri baru muncul di Taiwan, Korea Selatan, Bangladesh, dan di daerah-daerah Meksiko dan China dimana Kawasan Ekonomi Khusus diterapkan. Sebagai contoh dari pergeseran produksi itu, di tengah krisis dan deindustrialisasi yang melanda sebagian besar kota-kota industri lama di Amerika Serikat dan Eropa, kota-kota kecil di China seperti Shenzen dan Dongguan menjadi kota yang dibanjiri uang dan investasi karena aktivitas produksi kapitalis yang membutuhkan pembangunan megaproyek infrastruktur yang dapat menyerap surplus kapital untuk memfasilitasi volume perdagangan internasional yang semakin meningkat melalui pelabuhan dan bandar udara. (Harvey, 2010: 33)

Pergeseran geografi produksi ini tentu saja terjadi tidak di sembarang tempat dan waktu. Ruang tertentu yang akan dipilih untuk memindahkan atau mengalihkan surplus kapital ini sangat bergantung pada banyak faktor, di antaranya faktor ketersediaan buruh murah yang melimpah, ketersediaan sumberdaya alam yang memadai, dan ketersediaan lokasi-lokasi yang menguntungkan sebagai aktivitas bisnis. Hal lain yang memainkan peranan penting adalah adanya kebijakan-kebijakan negara, seperti adanya investasi negara untuk pembangunan infrastruktur, subsidi investasi, kebijakan pajak, dan kebijakan perburuhan yang fleksibel dan merestriksi serikat buruh, dan kebijakan "ramah investor".

Pergeseran geografi produksi ke wilayah-wilayah Asia sebenarnya sudah dimulai sejak lama. Pergeseran geografi produksi ini pada awalnya terjadi di negara-negara Asia Timur seperti Taiwan, Korea Selatan dan utamanya Cina. Studi David McNally (2009: 1946) menunjukkan bahwa pergeseran geografi kapital ke wilayah Asia mulai terjadi pada 1980an, setelah mengalami krisis tahun 1973-74, yang dibarengi dengan reorganisasi industri manufaktur ke negara-negara Selatan; gelombang perampasan tanah di Cina dan Korea Selatan, pengenalan teknologi dan berbagai macam bentuk organisasi kerja yang baru; serta investasi luar negeri yang massif ke Asia Timur. Sebagai akibatnya, aliran keuntungan dari negara-negara sedang berkembang ke negara-negara maju mulai mengalir lagi. Puncaknya, sekitar tahun 1990an Asia Timur menjadi pusat akumulasi dunia. Dalam catatan McNally (2009: 51), total formasi kapital di seluruh Asia Timur dalam kurun waktu 1990-1996 meningkat sejumlah 300%, sementara di Amerika Serikat dan Jepang hanya meningkat sekitar 40%, dan di seluruh Eropa hanya 10%.

Namun, ekspansi kapital di Asia Timur ini selalu menemui ambang batasnya. Krisis kapital kembali terjadi pada tahun 1997 di Asia, dipicu oleh pembangunan perkotaan

eksesif yang diiikuti oleh aliran kapital spekulatif di Thailand, Hongkong, India, Korea Selatan, Filippina dan Indonesia. Krisis 1997 ini merupakan merupakan sinyal awal bagi munculnya krisis 2008 di Eropa dan Amerika Serikat. Sejak krisis 2007, terdapat ledakan kredit finansial dan ekspansi kredit secara massif yang mendukung tingkat pertumbuhan. Hasilnya, sebelas tahun kemudian, meledaklah krisis 2008 di Amerika Serikat (McNally 2009: 53).

Pada April 2008, IMF kemudian mengumumkan bahwa dunia sekarang berada dalam "krisis finansial terbesar di Amerika Serikat sejak Depresi Besar". Meskipun tampak sebagai krisis finansial, pada dasarnya krisis tersebut merupakan krisis overakumulasi. Studi McNally (2009: 36) menunjukkan bahwa yang disebut krisis finansial di Amerika Serikat tersebut pada dasarnya merupakan krisis global, karena telah mengguncang Inggris, zona Eropa, Asia Timur dan negara-negara berkembang, lalu terus menyebar ke Islandia, Hungaria, Latvia, Ukraina, dan Pakistan. Hal lainnya, krisis tersebut pada dasarnya bukan lagi soal krisis finansial, tetapi juga krisis "ekonomi riil". Krisis ini pada mulanya menerpa sektor konstruksi, otomotif, elektronik, dan kemudian merambat ke sektor manufaktur dan sektor jasa. Krisis ini berakibat pada kebangkrutan pusat industri Detroit; menurunnya tingkat ekspor Jepang, China, Taiwan dan lainnya hingga 40-45%; kebangkrutan bank-bank-investasi di Wall Street. Krisis-krisis kapital yang terakhir ini tentu saja harus dicari jalan keluarnya. Dalam pandangan David Harvey (2003: 116), ketika krisis kapital terjadi maka yang dibutuhkan adalah cara-cara untuk menyerap surplus kapital dan tenaga kerja melalui "produksi ruang-ruang baru, pengorganisasian pembagian kerja teritorial yang baru, pembukaan kompleks-kolpeks sumberdaya baru yang murah, pembukaan wilayah-wilayah baru untuk menciptakan ruang yang dinamis bagi akumulasi kapital, dan penetrasi formasi sosial yang non-kapitalistik dan diganti dengan relasi sosial yang kapitalis beserta beserta pembentukan kebijakan institusional tertentu". Karena itu, desain-desain pembangunan untuk merestorasi kapital dari krisis harus diciptakan dan dibentuk.

Pembentukan Pasar Bebas Asia

Tetapi krisis kapitalis dan pergeseran geografi produksi tidak secara langsung membuat berbagai macam desain pembangunan muncul. Dibutuhkan faktor lain, yaitu kesediaan negara atau kumpulan berbagai macam negara dan lembaga pendukungnya untuk merancang, mengadopsi dan membentuk desain pembangunan untuk membangun pengaruh kekuatan ekonomi dan politik dalam alam persaingan saat ini. Sejak krisis di tahun 2008, negara-negara Asia Timur juga berupaya mengambil kesempatan dari krisis tersebut untuk membangun kekuatan ekonomi regionalnya. Sejak krisis Asia 1997, suara-suara untuk membangun regionalisme ekonomi di Asia semakin kencang. "*There Is No Alternative: Regionialism*", kata mantan Sekjen ASEAN Rhodolfo C. Severino Jr (1998-2002).[7] Untuk kepentingan membangun regionalisme ekonomi itu, lalu pemerintah, lembaga penelitian, dan korporasi di negara-negara Asia Timur dan Tenggara menginisiasi sebuah dokumen rencana pembangunan pasar bebas Asia yang disebut dengan *Comprehensive Asia Development Plan (CADP)*. Kombinasi antara mengambil kesempatan dari krisis ekonomi di Eropa dan Amerika dengan hasrat untuk membangun

7 http://www.asean.org/resources/item/no-alternative-to-regionalism-by-rodolfo-c-severino-jr, diakses tanggal 15 Januari 2014.

kekuatan ekonomi politik di wilayah Asia, menjadi pendorong lahirnya CADP. Dinyatakan dalam salah satu dokumen ERIA:

> "Krisis finansial global yang berasal dari Amerika Utara dan Eropa telah menyebabkan ketidakpastian dunia ekonomi saat ini. Kita harus mengambil tindakan apapun yang diperlukan untuk memitigasi dampak-dampak negatifnya, utamanya terhadap munculnya ekspektasi yang buruk terhadap pasar. Untuk memperbesar kepercayaan diri kita, saat ini penting untuk terus berinvestasi dalam proyek-proyek jangka menengah dan panjang, untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi sekaligus membangkitkan stimulus ekonomi jangka pendek. Sebagian besar dari sumberdaya finansial kita yang berasal dari simpanan yang besar sejauh ini tidak secara langsung diinvestasikan di wilayah kita sendiri, melainkan dialihkan ke Amerika Utara dan Eropa untuk kemudian diinvestasikan kembali ke Asia Timur. Karena itu, kita mesti menguatkan kembali saluran sirkulasi sumberdaya finansial kita di dalam wilayah Asia. Kombinasi penggunaan sumberdaya publik-swasta, strategi pembangunan, dan arsitektur finansial harus dibentuk. (*Economic Research Institute for ASEAN and East Asia 2009: 3)*

Dokumen CADP dihasilkan pada tahun 2010 oleh suatu lembaga *think-tank* yang bernama ERIA (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia). Lembaga ini, ERIA, sebenarnya mulai diinisiasi sejak tahun 2006. Sejumlah intelektual dan ahli ekonomi dari 16 negara mendiskusikan pentingnya sebuah lembaga untuk menopang integrasi ekonomi di wilayah ASEAN, terutama dalam hal menyusun gagasan konseptual, prinsip-prinsip, struktur, tema riset dan program pengembangan wilayah ASEAN. Sebelum CADP lahir, terdapat dokumen yang disebut dengan CEPEA (The Comprehensive Economic Partnership for East ASIA) yang dirancang sebagai cara bagi negara-negara ASEAN bekerjasama mewujudkan East Asia Free Trade Area (Kawasan Perdagangan Bebas Asia Timur), dan mulai dibicarakan pada tingkat ASEAN di tahun 2006 dan memperoleh sambutan luas seiring dengan pembentukan ERIA.

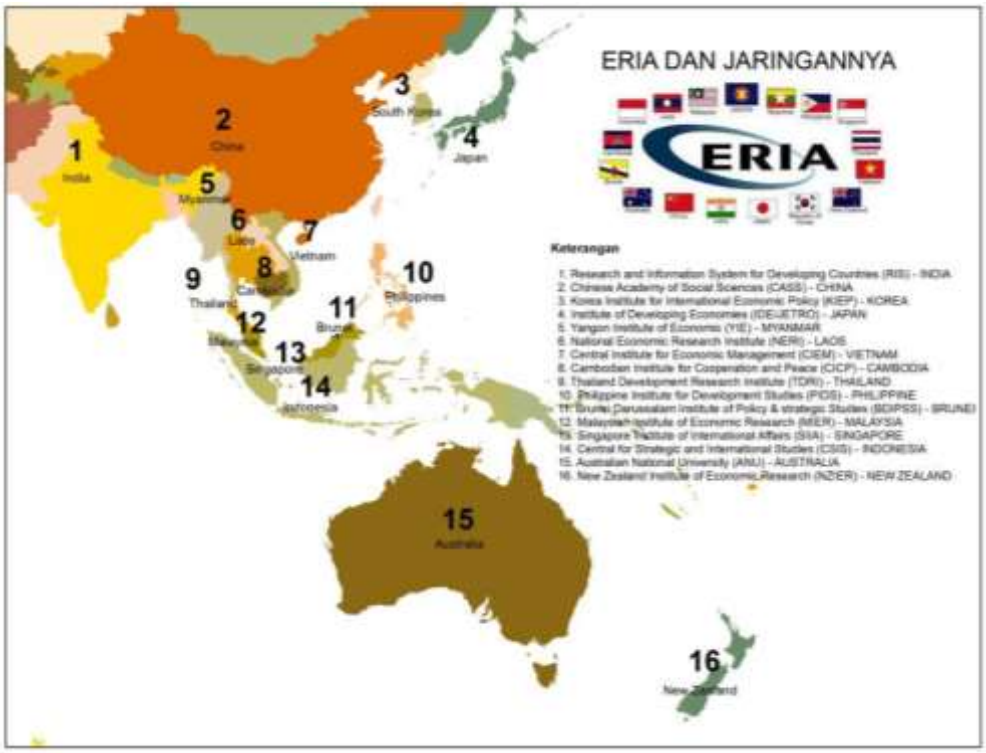
Pada 1 April 2007, di Manila, para kelompok ahli ini kemudian menyepakati poin-poin penting bagi pembentukan ERIA. Di antaranya adalah menghasilkan keputusan tentang tujuan-tujuan yang hendak dihasilkan oleh ERIA, yaitu: (1) memfasilitasi Komunitas Ekonomi ASEAN dan mendukung peran ASEAN sebagai pihak pendorong untuk integrasi ekonomi dan pertumbuhan berkelanjutan di wilayah tersebut; (2) untuk berkontribusi dalam mempersempit kesenjangan pembangunan dan mendorong penelitian yang dapat digunakan oleh untuk pengambilan kebijakan; serta (3) untuk memperdalam jalinan komunitas ekonomi Asia Timur. Pertemuan itu juga menghasilkan kesepakatan untuk merumuskan aktivitas-aktivitas utama ERIA, di antaranya adalah: (1) melaksanakan riset, analisis kebijakan, perencanaan strategis, dan mengumpan rekomendasi kebijakan dan mendukung Sekretariat Jenderal ASEAN dalam mendorong integrasi regional dan upaya-upaya kerjasama; (2) menyediakan forum dialog kebijakan dan interaksi antara peneliti, pembuat kebijakan dan masyarakat sipil; (3) menyusun suatu *platform* bersama untuk studi-studi ekonomi Asia Timur; (4) meningkatkan kapasitas riset kebijakan, utamanya di negara-negara terbelakang.

Lima bulan setelahnya, pada Agustus 2007, pada pertemuan antar Menteri Ekonomi ASEAN, Sekretariat Jenderal ASEAN memandatkan ERIA untuk menyusun suatu dokumen berbasis riset yang bernama "*Developing a Roadmap toward East Asian Economic Integration" dan "Energy Security in East Asia*". Pertemuan para menteri ini meneguhkan komitmen untuk pendirian ERIA pada November 2007, yang sekaligus bertepatan dengan pertemuan ketiga East Asia Summit pada November 2007. Pada pertemuan itulah seluruh pemimpin ASEAN, Australia, China, India, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru menyepakati untuk mendirikan ERIA yang akan diakomodir dalam struktur Sekretariat ASEAN.

Pada Juni 2008, peluncuran ERIA dilakukan, dan mengukuhkan ERIA sebagai suatu lembaga yang memiliki mandat sebagai berikut:

1. ERIA berfungsi sebagai suatu lembaga riset yang sekaligus bertugas untuk menjaga dan membangun hubungan komunikasi yang kuat dengan proses-proses pembentukan kebijakan. Hasil riset itu kemudian akan dijadikan rekomendasi kebijakan yang konkret dan dapat dilakukan sesuai kebutuhan yang didiskusikan oleh pertemuan para pemimpin dan kementerian di Asia.
2. ERIA mesti menjaga standar kualitas akademik yang tinggi dalam aktivitas risetnya dan menjadi fasilitator dalam forum pertemuan tripartit untuk dialog kebijakan dan interaksi antara peneliti, pembuat kebijakan dan masyarakat sipil.
3. ERIA menyediakan sumber-sumber informasi dan pengetahuan yang bermakna untuk mempersempit kesenjangan pengetahuan dan memperkuat kapasitas riset di negara-negara yang membutuhkan peningkatan kapasitas pembuatan kebijakan dan penelitian.
4. ERIA berfungsi sebagai suatu aset bersama (*common asset*) bagi negara-negara ASEAN dan Asia Timur dalam memberikan platform bersama untuk studi-studi ekonomi yang ilmiah, dan mesti membuka peluang untuk bekerja sama dengan berbagai lembaga penelitian dan organisasi yang lain di seluruh dunia ketika integrasi ekonomi Asia Timur akan dimulai.

Untuk menopang aktivitas risetnya, ERIA ditopang oleh jaringan enam belas lembaga penelitian di wilayah Asia, Asia Timur dan Australia, dan untuk di Indonesia di antaranya Center for Strategic and International Studies (CSIS). ERIA merupakan lembaga penelitian yang sangat produkstif saat ini dengan berbagai macam publikasi yang berupa hasil penelitian, kertas kebijakan, kertas diskusi dan berbagai publikasi lainnya yang digunakan untuk mendukung negara-negara Asia, komunitas bisnis, dan lembaga-lembaga penelitian di Asia.



Gambar 1: Lembaga-lembaga penelitian jaringan ERIA.
Sumber: http://www.eria.org/about_eria/organization/16rin.html, diakses tanggal 10 Desember 2013. Peta dibuat oleh Didi Novrian.

Kristalisasi penelitian berbagai lembaga-lembaga tersebut pada akhirnya menghasilkan suatu dokumen yang disebut sebagai Comprehensive Asia Development Plan (CADP) yang dipublikasikan pada tahun 2009. Asia yang dimaksud dalam dokumen CADP ini mencakup negara-negara yang tergabung dalam Asia Tenggara dan Asia Timur, hingga Australia dan Selandia Baru, atau yang populer disebut dengan ASEAN + 3 atau ASEAN + 6. CADP mengklaim bahwa dokumen tersebut bertujuan untuk menciptakan "*desain spasial induk untuk pembangunan infrastruktur dan penempatan industri di Asia dan Asia Timur yang berupaya untuk memperdalam integrasi ekonomi dan mempersempit ketimpangan pembangunan*" (ERIA 2009: 2).[8]

Bagaimanapun, CADP bukan berangkat dari kertas kerja yang semata-mata teoretis atau dari hasil pemikiran ruang hampa. Malahan, ia diinspirasikan dari beragam momen nyata di negara-negara Asia Timur yang dianggap memiliki keunggulan dan daya tahan menghadapi gempuran krisis. Berbagai fenomena itu di antaranya adalah: *Pertama*, negara-negara Asia Timur dianggap telah memiliki pengalaman yang luar biasa dalam

8 Ketika CADP diluncurkan, Sekjen ASEAN saat ini, Dr. Surin Pitsuwan, menyatakan bahwa CADP merupakan "*Asian Marshall Plan*". Istilah ini memang dimaksudkan secara eksplisit untuk merujuk pada Marshall Plan: program Amerika Serikat pasca Perang II untuk membangun kembali Eropa Barat dan menciptakan ekonomi yang kuat untuk menyingkirkan kekuatan komunis. Jadi, *Asian Marshall Plan*, atau CADP, ini diklaim sebagai upaya untuk membangun kembali ekonomi dunia kapitalis yang sedang tergoncang hebat akibat krisis. Dalam ungkapan optimistik yang lain, Asia diklaim bakal menjadi "*the driver for global economy*". Lihat http://globalnation.inquirer.net/news/breakingnews/view/20100112-246887/Asean-prepares-own-Marshall-Plan, diakses tanggal 15 Januari 2014.

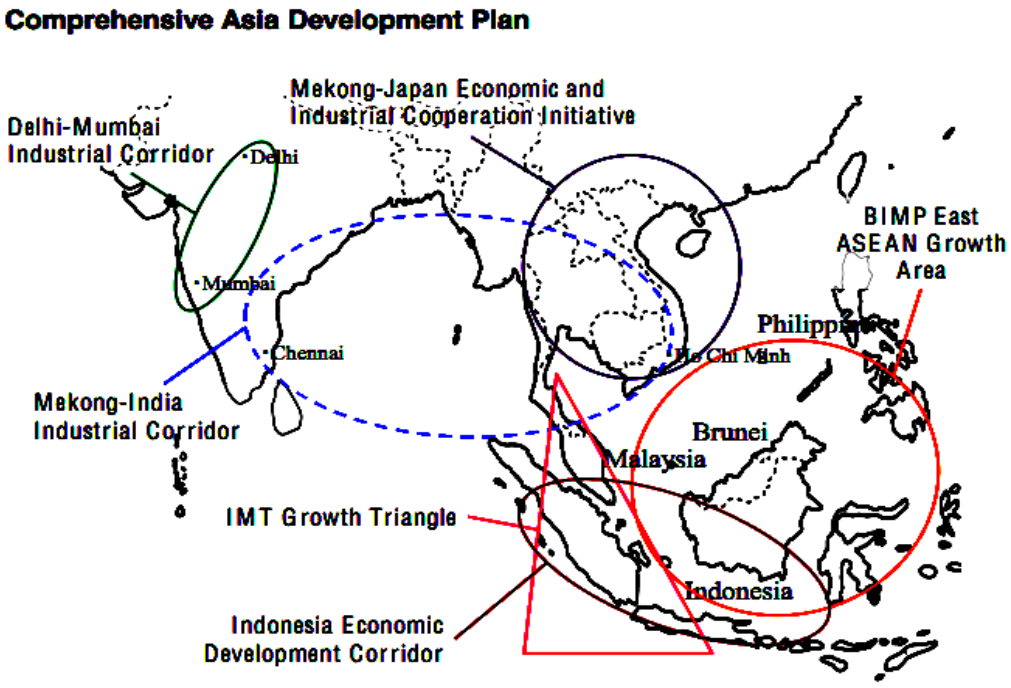
mengembangkan jaringan produksi internasional (*international production network*) atau yang dikenal dengan istilah Pabrik Asia (*Factory Asia*). *Factory Asia* adalah suatu model yang berisi jaringan-jaringan produksi tingkat regional yang menghubungkan pabrik-pabrik di berbagai wilayah ekonomi Asia yang memproduksi bagian-bagian dan komponen-komponen yang kemudian dirakit, dan produk akhirnya dikirim ke wilayah-wilayah "ekonomi maju". Jaringan-jaringan tersebut merupakan bagian dari rantai produksi komoditas di tingkat regional dan global (ADB 2013: 2).

Selama tiga dekade terakhir, di antara negara-negara Asia telah mengembangkan suatu bentuk baru pembagian kerja yang mengubah pola produksi dan perdagangan internasional di wilayah tersebut. Sejak tahun 1960an, sudah terdapat proses mengintegrasikan Asia ke dalam rantai pasokan global. Ini dimulai dengan industri elektronik dengan kedatangan dua perusahaan elektronik Amerika Serikat, National Semiconductors dan Texas Instruments, yang membangun perusahaan untuk merakit alat-alat semikonduktor di Singapura. Pada tahun 1970an, beberapa perusahaan multinasional juga mulai merelokasi pabriknya ke negara-negara seperti Filippina, Malaysia dan Thailand. Hingga tahun 2000an, jaringan produksi internasional di Asia ini menjadi pemain penting dalam rantai pasokan global. Dengan gambaran semacam itu, maka saat ini Asia menempati posisi sebagai *the factory of the world* (ERIA 2009: vi).

Kedua, negara-negara di Asia dianggap merupakan pelari garis depan dalam mendorong pembentukan rejim pasar bebas untuk perdagangan dan investasi. Sejak tahun 1980an, negara-negara Asia telah terlibat aktif dalam menarik berbagai macam investasi asing langsung (ERIA 2009: 3). Sejak tahun 1992, misalnya, negara-negara ASEAN misalnya telah menyepakati suatu perjanjian blok perdagangan yang disebut dengan AFTA (Asean Free Trade Area). Tujuan utama AFTA adalah meningkatkan tingkat produksi negara-negara ASEAN, utamanya menyangkut hambatan tarif dan non tarif; serta menarik lebih banyak investasi asing langsung ke negara-negara Asean. Setelah krisis di Asia tahun 1997, regionalisme di Asia terus tumbuh dan membesar dan menjadi liberalisasi perdagangan di negara-negara Asean dan negara-negara lain yang dikenal dengan *Asean Plus Three* (Cina, Korea Selatan, dan Jepang) atau *Asean Plus Six* (Cina, Korea Selatan, Jepang, India, Selandia Baru, Australia dan India) untuk memajukan kerjasama di bidang pangan, energi dan infrastruktur (Urata 2008: 1). Berbagai kebijakan liberalisasi perdagangan itu pada akhirnya memungkinkan praktik jaringan produksi internasional dan Pabrik Asia dapat terbentuk dan semakin meluas di kawasan Asia.

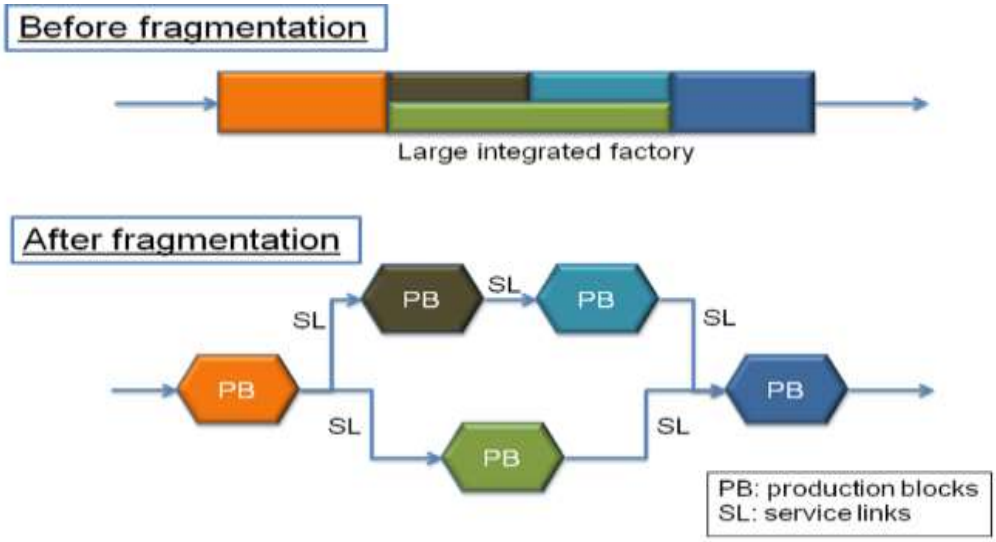
Ketiga, peranan perusahaan multinasional yang semakin membesar di negara-negara Asia. Desainer dan koordinator utama dari jaringan produksi internasional ini adalah perusahaan multinasional dengan beragam kebangsaan: Jepang, Korea, Taiwan, Hong Kong, Eropa, dan Amerika. Secara aktif perusahaan-perusahaan multinasional ini menggunakan mekanisme jaringan produksi internasional (ERIA 2009: 3).

Di dalam melakukannya, sebagaimana MP3EI, CADP juga mendorong berbagai macam pembentukan koridor ekonomi: *Koridor Ekonomi Greater Mekong Subregion* yang terdiri dari Cina, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand; *Koridor IMT* yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Thailand; dan *Koridor Southern Archipelago atau BIMP*, yang terdiri dari Brunei Darussalam; Indonesia, Malaysia dan Filippina; *Koridor Industri Delhi-Mumbai*; *Koridor Ekonomi dan Industri Mekong-Jepang*; dan *Koridor Ekonomi Mekong-India*.



Gambar 2: CADP. Sumber: ERIA (2010)

Tujuan utama yang menopang CADP adalah *Konektivitas Asia*. Ini terdiri dari dua aspek, yaitu pemencaran (fragmentasi) blok-blok produksi ke seluruh Asia dan pembangunan infrastruktur sebagai layanan penghubung berbagai sentra produksi tersebut. Pendeknya, dengan CADP tujuannya adalah merealisisasikan mimpi Asia menjadi Pabrik Dunia. Jika dahulu, kecenderungan pembangunan industri dilakukan dengan membangun satu pabrik di satu negara atau satu lokasi tertentu yang diorganisasikan secara detail dan terpadu, maka CADP mendorong untuk memencarkan dan membangun berbagai macam kluster-kluster ekonomi dan sentra industri di berbagai negara dan beragam lokasi yang mesti dilayani dengan pembangunan infrastruktur atau layanan penghubung (*service link*). Cara ini diyakini dapat menurunkan total biaya produksi dan meningkatkan tingkat keuntungan korporasi daripada membangun suatu pabrik besar yang terintegrasi di satu lokasi saja (ERIA 2009: 5).



Gambar 3: kerangka berpikir CADP tentang konektivitas, yaitu menyebar blok produksi dan membangun layanan penghubung. Sumber: ERIA (2011)

Lalu, apa hubungan antara ERIA, CADP dan pembentukan MP3EI? Sejak tahun 2010, pada level Asia, terdapat berbagai inisiatif pembangunan, yang disuarakan sebagai "pembangunan infrastruktur". Ini dimulai sejak Oktober 2010, ERIA mempublikasikan CADP dan Master Plan on Asean Connectivity (MPAC) untuk kerangka inisiatif pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2009, ERIA melalui Boston Consulting Group menyelesaikan penelitian tentang Indonesia Economic Development Corridors (IEDCs). Hasil riset IEDCs dan kata kunci "konektivitas" akhirnya diadopsi oleh Koordinator Kementerian Urusan Ekonomi untuk disusun menjadi naskah MP3EI. Sehingga, dapat dikatakan bahwa CADP adalah ibu kandung MP3EI, yang dilahirkan dalam rahim yang sama: pembentukan pasar bebas Asia.

Tabel 1. Inisator Pelaksanaan Program Investasi di wilayah ASEAN.

Inisiatif	**Finalisasi**	**Badan Pelaksana**	**Wilayah Kerja**
CADP	Oktober 2010	East Asia Summit	Wilayah ASEAN
MPAC	Oktober 2010	ASEAN	ASEAN
IEDCs	April 2011	Indonesia	Indonesia
MPA	Desember 2010	Indonesia-Jepang	Jakarta Metropolitan Area

Sumber: Umezaki (2011: 27)

Secara sederhana, dapat diringkas bahwa kerangka pikir CADP dan MP3EI sebenarnya merupakan suatu upaya untuk memecahkan krisis kapital melalui dua jalur: "*pembukaan dan penyebaran ruang-ruang baru untuk industri*" dan "*penghilangan hambatan ruang yang ditempuh melalui pembangunan infrastruktur agar waktu untuk realisasi keuntungan semakin cepat*". Melalui dua mekanisme inilah, dalam asumsi CADP dan MP3EI, akan tercipta "*spatial equilibrium*" atau keseimbangan spasial yang umumnya ditandai oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Melalui dua jalur itu pulalah istilah "percepatan dan perluasan" dalam MP3EI berasal. Perluasan berarti memperluas, menyebar dan memperbanyak ruang-ruang untuk kepentingan bisnis; sedangkan percepatan berarti mempercepat dan memperpendek waktu agar realisasi keuntungan bagi para pebisnis semakin cepat. Karena itu, istilah "perluasan dan percepatan" MP3EI mesti dibaca dengan kata perintah yang lain: Perluas ruang untuk memperbesar laba! Percepat keuntungannya!

III.
Bagaimana MP3EI Bekerja?

Desain pembangunan seperti MP3EI tentu saja membutuhkan berbagai macam praktik dari aparatus negara untuk membuatnya bekerja. Bagian ini akan memaparkan tiga mekanisme utama dalam membuat MP3EI bekerja: *pertama*, pembentukan dan pemangkasan kebijakan. Meskipun mekanisme semacam ini lazim ditemui dalam negara Orde Baru, namun apa yang berbeda dari proses pembentukan dan pemangkasan regulasi di bawah MP3EI adalah skala dan kecepatannya. Di bawah MP3EI, dengan proses yang cepat negara mengkonsentrasikan sumberdaya yang dimilikinya untuk benar-benar memanjakan dan memuluskan aliran kapital finansial dan industrial. *Kedua*, penyebaran blok-blok produksi. Ini dilakukan bukan hanya melalui perluasan pemberian konsesi-konsesi untuk perusahaan, tetapi juga melalui penambahan dan perluasan alokasi ruang untuk Kawasan Perhatian Investasi dan Kawasan Ekonomi Khusus. *Ketiga*, sebagai upaya untuk merespon krisis kapitalis dalam skala dunia, negara secara aktif memfasilitasi berbagai upaya dan inisiatif kapitalis untuk menjadikan infrastruktur sebagai bisnis dan industri.

Pembentukan dan Pemangkasan Kebijakan

Bagaimana dan mengapa negara memberlakukan desain pembangunan MP3EI? Bagaimana moda dan strategi pembangunan negara terus-menerus mengalami perubahan untuk membuat kapital mengalir lancar?. Pemberlakuan desain pembangunan MP3EI mesti ditinjau dari gelombang besar munculnya "rejim-rejim perdagangan dan investasi dalam skala Asia" (ERIA 2007: 3) yang semakin mengadopsi gagasan tentang perlunya negara untuk semakin terintegrasi ke dalam sistem pasar internasional dan meninggalkan strategi pembangunan yang dipandu negara.

Studi Robison (*dalam* Hadiz [ed], 2006: 52-53) menyebutkan bahwa sejak berakhirnya masa kolonialisme, berhadapan dengan kekuasaan global, negara-negara di wilayah Asia Tenggara memasuki dua fase. Fase pertama terjadi sekitar tahun 1950an-1960an, ketika negara-negara Barat, utamanya aliansi-aliansi utama Amerika Serikat, mulai mendorong dan mengkonsolidasikan kekuatan politik antikomunis yang berupaya untuk menghentikan gerakan politik revolusioner. Lalu konsolidasi politik itu diikuti oleh konsolidasi ekonomi, ketika menurunnya industri manufaktur negara-negara Barat mulai terjadi dan mulai berupaya untuk mereorganisasi tata dunia global ke arah sistem pasar global.

Setelah fase itu, negara-negara di Asia Tenggara masuk ke dalam fase kedua, yaitu sebuah fase dimana negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, masuk ke dalam sebuah proyek global yang lebih besar, yang bertujuan untuk membongkar isolasi kapitalisme negara dan mendorong terlaksananya pasar bebas dan rejim deregulasi finansial. Secara faktual, kemunculan rejim perdagangan dan investasi ini dimulai pasca 1997-1998 ketika perekonomian negara-negara Asia Timur dan Tenggara mengalami kerusakan berat akibat krisis finansial. Indonesia menjadi negara yang paling menderita

dan paling parah akibat krisis tersebut. Nilai rupiah jatuh hingga 80%, pertumbuhan ekonomi terpuruk pada angka minus 13,6% dengan tingkat inflasi 65% (Hiariej 2005: 234).

Krisis yang berkombinasi dengan suatu aksi massa besar-besaran yang dilakukan oleh kelompok organisasi masyarakat sipil, serikat buruh dan petani, gerakan mahasiswa, dan adanya friksi di tubuh elit penopang Orde Baru, mengantarkan rejim Soeharto ini pada keruntuhannya. Kejatuhan Orde Baru menandai suatu pergeseran dari model pembangunan ekonomi yang dipandu oleh negara (*state-led developmentalism*) untuk masuk ke dalam model pembangunan ekonomi yang dipandu oleh pasar (*market-led developmentalism).*

Krisis itu juga memberikan jalan bagi masuknya program-program penyesuaian struktural (*structural adjustment program*) yang dipandu oleh gagasan-gagasan lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Program-program penyesuaian struktural ini merupakan bagian dari proyek neoliberal yang pada umumnya diadopsi sebagai paradigma ekonomi di sebagian besar negara di dunia.

Di Indonesia, proyek neoliberal ini pertama kali diperkenalkan dan dilakukan melalui 50 poin *Letter of Intent* yang pada gilirannya mengantarkan Indonesia untuk mengambil resep-resep pembangunan internasional dalam bentuk Program Penyesuaian Struktural yang diberikan oleh lembaga-lembaga keuangan internasional semacam Bank Dunia dan IMF. Bonnie Setiawan (2014: 13) secara umum merekam tiga bentuk proyek intervensi neoliberal di masa akhir Orde Baru dan awal masa Reformasi yang dilakukan di Indonesia, yang terdiri dari:

1. Paket kebijakan penyesuaian struktural, yang terdiri dari beberapa hal berikut: (a) Liberalisasi impor dan pelaksanaan aliran uang yang bebas; (b) Devaluasi; (c) Kebijakan moneter dan fiskal dalam bentuk: pembatasan kredit, peningkatan suku bunga kredit, penghapusan subsidi, peningkatan pajak, kenaikan harga *public utilities*, dan penekanan untuk tidak menaikkan upah dan gaji.
2. Paket kebijakan deregulasi, yaitu: (a) intervensi pemerintah harus dihilangkan atau diminimumkan karena mendistorsi pasar; (b) privatisasi yang seluasnya utamanya untuk bidang-bidang ekonomi yang ini dikuasai oleh negara; (c) liberalisasi seluruh kegiatan ekonomi termasuk penghapusan segala jenis proteksi; (d) memperbesar dan memperlancar arus masuk investasi asing dengan fasilitas-fasilitas yang lebih luas dan longgar.
3. Paket kebijakan yang juga direkomendasikan kepada beberapa negara Asia dalam menghadapi krisis ekonomi akibat menurunnya nilai tukar mata uang terhadap dollar AS, yang merupakan gabungan dari dua paket di atas dengan tambahan beberapa tuntutan spesifik.

Dengan demikian, rejim-rejim sejak masa Reformasi secara aktif dan mendalam semakin mengadopsi gagasan tentang pembangunan yang dipandu oleh gagasan tentang proyek neoliberal: privatisasi-deregulasi-liberalisasi. Meskipun secara rutin rejim-rejim pemerintahan pasca Orde Baru menolak untuk diasosiasikan dengan proyek neoliberal, tetapi pada kenyataannya Indonesia semakin masuk ke dalam rejim perdagangan bebas. Ringkasnya, menjadi negara neoliberal dan atau secara perlahan bergeser ke arah negara neoliberal (Chandra 2011: 10; Hiariej 2005: 2).

Sejak itu, negara terus-menerus memperluas sejumlah kerangka juro-politik yang diperlukan untuk memperluas pasar bebas dan menopang investasi. Hal ini ditunjukkan dengan pengesahan sejumlah regulasi yang mempermulus akumulasi kapital. Beberapa regulasi itu di antaranya adalah Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; berbagai macam undang-undang untuk meliberalisasi sektor keuangan dan perbankan; UU No. 2 tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi yang berfungsi untuk memberikan wewenang yang besar pada pasar. Negara juga mendukung terciptanya pasar tenaga kerja yang murah dan fleksibel serta komodifikasi tenaga kerja melalui Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. (Syamsul Hadi, et, al 2012; Daeng 2008).

Ketika MP3EI bekerja, upaya untuk memangkas sejumlah regulasi yang dianggap menghambat dan menganggu investasi atau yang diistilahkan sebagai *debottlenecking regulations* semakin cepat. Hingga saat ini terdapat sejumlah regulasi yang telah dipangkas untuk keperluan melancarkan MP3EI, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Penyesuaian regulasi yang dilakukan oleh pemerintah.

No	Regulasi/Peraturan (Berdasar Perpres MP3EI)	Penanggung Jawab	Target Penyelesaian	Realisasi
1	Perlu pengkajian ulang (UU dan PP Keagrariaan) untuk memasukkan status tanah ulayat sebagai bagian komponen investasi, sehingga memberikan peluang kepada pemilik tanah ulayat untuk menikmati pertumbuhan ekonomi di daerahnya (terkait realisasi MIFEE)	BPN, Kemenhut, Kemendagri	Desember 2011	Penerbitan UU No. 2 Tahun 2012 Pengadaan Tanah untuk Pembangunan dalam rangka Kepentingan Umum.
2	Percepatan revisi PP No.68/1998 tentang Kawasan Pelestarian Alam dan Kawasan Suaka Alam	Kemen.Kehut, Setkab	Desember 2011	Selesai dengan diterbitkannya PP No.28/2011 tentang Kawasan Pelestarian Alam dan Kawasan Suaka Alam
3	Percepatan revisi PP No. 62/2008 tentang Perubahan Atas PP No. 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Tertentu atau di	Kemenkeu	Desember 2011	**Selesai** dengan diterbitkannya PP No. 52/2011 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di

	Daerah Tertentu			Bidang Tertentu atau di Daerah Tertentu
4	Percepatan penetapan RPP tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPARNAS) 2010-2025	Kemen. Budpar	Juni 2011	**Selesai** dengan diterbitkannya PP No.50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPARNAS) 2010-2025
5	Revisi Perpres No. 13/2010 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur	Kemenko.Perekon, KemenKeu, Bappenas, BKPM	Juli 2011	**Selesai** dengan diterbitkannya Perpres No. 56/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
6	RPerpres tentang Pertambangan Bawah Tanah dalam rangka Investasi *Geothermal*.	Kemen.Kehut, Setkab	Desember 2011	Selesai dengan diterbitkannya Perpres No.28/2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah
7	Penerbitan peraturan perundang-undangan yang mendorong pembangunan infrastruktur di Kawasan Indonesia Timur	Kemen. PU, Kemen. Perhub	Desember 2011	Selesai dengan diterbitkannya: 1). Perpres No. 55/2011 tentang RTR Mamminasata (Makassar, Sungguminasa, dan Takalar) 2). Perpres No. 88/2011 tentang RTR Sulawesi 3). Perpres No. 65/2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi

				Papua Barat 4). Perpres No. 66/2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
8	Penerbitan Keppres tentang Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPIP) sesuai amanat UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan	Kemenbudpar	Mei 2011	Selesai dengan diterbitkannya Keppres No. 22/2011 tentang Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPIP)
9	Percepatan penerbitan regulasi tentang moratorium kehutanan.	Kemenko Perekon, Kemen.Kehut, Setkab	Juli 2011	Selesai dengan diterbitkannya Inpres No.10/2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut
10	Peninjauan kembali PMK 67 Tahun 2010 Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar (BK)	KemenKeu, Kemen. Dag, Kemen. Perind	Agustus 2011	Selesai dengan diterbitkannya PMK No. PER-128/PMK.011/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010 tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar
11	Penetapan jaminan pasokan energy (migas dan batubara) dan bahan baku (kelapa sawit, karet dan kakao, pasir dan bijih besi) untuk pengembangan industri hilir	Kemen. ESDM, Kemen. Pertanian	Desember 2011	Selesai dengan diterbitkannya Keputusan Menteri ESDM nomor 1991 K/30/MEM/2011 tentang Penetapan Kebutuhan dan Presentase Minimal Penjualan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun

				2012
12	Revisi PMK No 241 Tahun 2010 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor berlaku 22 Des 2010	Kemen. Keuangan	Agustus 2011	**Selesai** dengan diterbitkannya PMK No. 80/PMK.011/2011 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor
13	Revisi PMK No 140 Tahun 2007 tentang Import Sementara untuk pembebasan bea masuk sementara bagi kendaraan /sarana pengangkut yang digunakan sendiri/wisatawan mancanegara dan pemasukan barang pendukung kegiatan MICE	Kemen. Keuangan	Desember 2011	**Selesai** dengan diterbitkannya PMK No. 142/PMK.04/2011 tentang Impor sementara
14	Peraturan yang mengatur tentang percepatan pelaksanaan pemanfaatan lahan-lahan terlantar	BPN, Kemen. Dalam Negeri, Pemda	Juli 2011	Selesai dengan diterbitkannya Peraturan Kepala BPN No. 5/2011 tentang tata cara Pendayagunaan tanah Negara Bekas tanah terlantar

Sumber:http://setkab.go.id/en/mp3ei-3938-27-regulasi-telah-diterbitkan-untuk-sukseskan-mp3ei.html, diakses pada 20 Januari 2014.

Dengan model semacam ini, negara sebenarnya melakukan salah satu mekanisme penting dalam membuat MP3EI bekerja: membentuk sekaligus memangkas regulasi

demi melancarkan aliran kapital finansial dan industrial.[9] Dengan terbentuknya negara neoliberal yang semakin ramah dan aktif memfasilitasi aliran kapital finansial dan industrial untuk masuk ke Indonesia, maka pembentukan MP3EI laiknya seperti pukulan gong peresmian suatu acara perjamuan yang telah siap berjalan. MP3EI berada di dalam suatu fase dimana negara neoliberal sudah tercipta dan bekerja selama kurang lebih satu dekade. MP3EI juga dapat dianggap sebagai momen pematangan dari model pembangunan ekonomi dan strategi industrialisasi pasca Orde Baru.

Menyebar Blok-blok Produksi

Salah satu mekanisme penting dari peranan negara untuk membuat MP3EI bekerja adalah melalui kebijakan konsesi yang berupa pengalokasian ruang tertentu oleh negara dalam jangka waktu tertentu bagi kegiatan bisnis korporasi raksasa. Ini dilakukan dengan memperluas atau menambah pemberian konsesi tanah skala luas untuk produksi komoditas global untuk sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan maupun dengan pembentukan kawasan-kawasan ekonomi, seperti kawasan perhatian industri atau kawasan ekonomi khusus.

Pada mekanisme ini, negara memberikan dan memperluas konsesi skala besar untuk produksi komoditas global kepada korporasi-korporasi raksasa di bidang pertambangan, perkebunan dan kehutanan untuk memproduksi beragam komoditas global atau komoditas keperluan ekspor. Model semacam ini sebenarnya telah berjalan sejak masa kolonial. Pada wilayah hutan, misalnya, negara memberikan konsesi-konsesi yang berupa Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pengusahaan Hutan untuk Tanaman Industri (HPHTI), yang merupakan dua bentuk konsesi kehutanan terutama untuk ekstrasi kayu. Hingga tahun 2005, misalnya luas areal konsesi kehutanan yang tersisa sekitar 28 juta hektar yang dikuasai hanya oleh 285 unit. Sementara, untuk Konsesi Pertambangan negara memberikan sejumlah ijin yang berupa Kontak Karya (KK), Kuasa Pertambangan (KP), atau Izin Usaha Pertambangan bagi beroperasinya industri tambang skala besar. Hingga tahun 1999 saja, Departemen Pertambangan mengalokasikan sekitar 264,7 juta hektar lahan untuk 555 perusahaan pertambangan, baik perusahaan dalam negeri (swasta dan BUMN) dan perusahaan asing, untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi barang tambang. Sementara untuk usaha perkebunan, negara memberikan Hak Guna Usaha (HGU) atau Izin Usaha Perkebunan untuk berbagai macam usaha perkebunan (Bachriadi dan Wiradi 2011: 12-14). Hingga tahun 2013, misalnya, tercatat lebih dari 13,5 juta hektar diperuntukkan hanya untuk perkebunan sawit. Lebih dari separuhnya adalah perkebunan sawit milik koorporasi asing, domestik, maupun perusahaan negara.

Namun, desain MP3EI bukan hanya melestarikan dan memperluas pemberian konsesi-konsesi skala besar untuk produksi komoditas global tersebut, melainkan juga

9 Dengan kata lain, di bawah MP3EI, aparatus negara Indonesia mempermatang posisinya sebagai negara neoliberal. Ini artinya, dalam ungkapan Harvey "negara yang memiliki kekuatan polisional dan monopoli atas alat-alat kekerasan yang bisa menjamin terciptanya kerangka institusional hukum, hak miliki pribadi, kontrak dan kepastian nilai uang tertentu dan mendukung keberadaan semua itu dengan tatanan-tatanan konstitusional tertentu. Dalam bentuk konkretnya, negara neoliberal memainkan peranan untuk memfasilitasi terciptanya akumulasi kapitalis yang lebih besar dengan memainkan peranan kunci dalam akumulasi primitif, bukan saja untuk memaksakan diadopsinya tatanan institusional yang kapitalistik, namun juga untuk mendapatkan dan memprivatisasikan aset-aset yang merupakan basis utama bagi akumulasi kapital" (Harvey 2009).

memperdalamnya melalui kebijakan pengolahan komoditas-komoditas tersebut hingga ke tingkat hilir, atau biasa disebut dalam dokumen MP3EI sebagai hilirisasi. Dengan kebijakan hilirisasi semacam ini artinya negara secara lebih lanjut memperluas pembentukan kawasan-kawasan ekonomi atau kawasan industri.

Di Indonesia, pembentukan kawasan ekonomi juga bukan hal yang baru. Sejak tahun 1970, Indonesia telah mengembangkan suatu jenis kawasan ekonomi yang disebut dengan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas melalui UU NO. /1970. Pada tahun 1972 dikembangkan kategori lain dari kawasan industri yang disebut dengan Kawasan Berikat. Kemudian tahun 1989, dibentuk suatu kategori kawasan yang bernama Kawasan Industri. Setelah itu pada tahun 1996 dikembangkan lagi kategori kawasan ekonomi menjadi Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET). Pada fase terakhir, kategori kawasan ekonomi bertambah dan berkembang lagi menjadi Kawasan Ekonomi Khusus, yang dimulai pada tahun 2009.

Tabel 3: Kategori kawasan ekonomi di Indonesia

Bentuk Kawasan	Landasan Hukum	Definisi/Tujuan
Kawasan Berikat (7 lokasi)	PP No. 33/1996 → PP No.32/2009	Kawasan dengan batas tertentu untuk pengolahan barang asal impor dan DPIL yang hasilnya untuk tujuan ekspor
Kawasan Industri (86 Lokasi)	Keppres No. 41/1996 → PP No. 24 /2009	Kawasan pemusatan kegiatan industri (KI) yang dikelola oleh perusahaan KI
Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) (13 Lokasi)	PP No. 26/2007 Keppres Pembentukan Kapet	Kawasan yang memiliki potensi cepat tumbuh, sektor unggulan dan potensi pengembalian investasi yang besar
FTZ atau KPBPB (4 lokasi)	UU No.37/2000 PP No. 46, 47, 48 Tahun 2008	Kawasan dengan batas tertentu yang terpisah dari daerah pabean sehingga terbebas dari bea masuk, PPN, PPnBM dan cukai
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (50 pengusul)	UU No. 39/2009 Perpres No. 33/2010 Kepres No. 8/2010	Kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah NKRI untuk menyelenggarakan fungsi perekonmian yang bersifat khusus dan memperoleh fasilitas tertentu.

Sumber: Hasil Olahan Deputi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2010

Pada kawasan-kawasan ekonomi semacam ini negara memberikan berbagai macam fasilitas kemudahan perijinan dan penyediaan lahan kepada pengelola kawasan ekonomi yang pada gilirannya menyewakan kembali kepada perusahaan-perusahaan dengan berbagai macam fasilitas listrik, air bersih, pengolahan limbah kawasan, keamanan, dan layanan pengurusan perijinan. Sementara, pada Kawasan Ekonomi Khusus yang memerlukan biaya dan pendanaan yang sangat besar, pemerintah pada umumnya memiliki peranan yang lebih besar utamanya dalam hal regulasi untuk menyediakan tanah, infrastruktur maupun pengelolaan kawasan ekonomi.

Sebagai akibat dari pengalokasian ruang yang lebih banyak untuk kepentingan industri dan pebisnis, maka hal yang krisis agraria yang berupa ketimpangan penguasaan atas tanah, perampasan tanah, transaksi tanah skala luas, pengusiran dan kekerasan terhadap rakyat Indonesia semakin sering terjadi. Hal semacam ini tentu mengakibatkan akses rakyat pada tanah sebagai sumber penghidupan semakin lama menjadi semakin hilang, sulit atau menyempit. Makin lama makin tak tersisa ruang hidup, kecuali untuk ruang untuk perusahaan-perusahaan raksasa. Sementara, upaya-upaya Badan Pertanahan Nasional di bawah pemerintahan SBY, melalui Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN), tidak secara penuh dilaksanakan untuk membatalkan atau menidakberdayakan penguasa konsesi skala besar. Melainkan hanya berupa redistribusi tanah sisa perkebunan serta sertipikasi tanah yang bertujuan untuk meneguhkan kepemilikan individual atas tanah dan memungkinkan pasar tanah bekerja. Pendeknya, program semacam itu sama sekali tidak berhasil merombak struktur penguasaan tanah dan sumberdaya yang timpang di Indonesia.

Membuat Infrastruktur Menjadi Industri

Di bawah MP3EI, proyek pembangunan infrastruktur mendapatkan momentumnya. MP3EI seperti menjadi masa keemasan bagi pembangunan infrastruktur. Tetapi untuk siapakah infrastruktur yang dirancang dan dibangun oleh MP3EI? Bagaimana mekanisme pembangunan infrastruktur bekerja? Siapa yang paling mendapat keuntungan dari *booming* pembangunan infrastruktur saat ini?

Pembangunan infrastruktur yang difasilitasi oleh CADP dan MP3EI pada dasarnya berhubungan dengan kecenderungan para pengusaha skala dunia untuk menginvestasikan uangnya dalam bentuk bisnis infrastruktur. Dalam suatu diskusi yang dibuat sebuah lembaga berskala dunia yang berpengaruh, Mckinsey Global Institute, bertajuk *Rethinking Infrastructure* dinyatakan bahwa "untuk tetap memacu pertumbuhan ekonomi global antara saat ini hingga tahun 2030, dunia membutuhkan investasi sebesar 57 triliun USD pada jalan raya, jembatan, pelabuhan, bandar udara, tenaga listrik, fasilitas air dan berbagai bentuk infrastruktur lainnya. Jumlah itu berkisar hampir 60% di atas jumlah yang telah dibelanjakan selama 18 tahun terakhir".

Forum itu menunjukkan bahwa saat ini kecenderungan yang terjadi adalah para pengusaha raksasa skala dunia lebih menyukai untuk terjun dalam bisnis infrastruktur. Mengapa demikian? Mark Wiseman, seorang presiden dan CEO dari Canada Pension Plan Investment Board yang dalam forum itu mewakili investor menyatakan:

> "Dari sudut pandang investor, kami tidak sedang mengupayakan untuk mengelola aset-aset kami seperti perusahaan saham... Apa yang sedang kami upayakan adalah investasi yang bersifat jangka-panjang, menjemukan, dan dapat diprediksi. Semakin panjang aset yang akan kami biayai untuk investasi, semakin itu menarik buat kami, dan semakin kami ingin membiayai bisnis itu... Saat ini tersedia jumlah kapital yang sangat besar yang tertarik untuk berinvestasi dalam bisnis infrastruktur. Jadi ini bukan masalah ketiadaan suplai kapital. Masalahnya adalah: apakah sebuah negara, dalam yuridiksinya, dapat bersaing untuk mendapatkan kapital itu secara efektif dengan menurunkan potensi-potensi resiko dari bisnis infrastruktur? Jadi, saat ini kami bersedia untuk mengambil resiko, katakanlah, untuk pembangunan jalan tol---kami bersedia menanggung

> resiko lalulintas dan seberapa banyak lalulintas dalam jalan tol itu" (http://www.mckinsey.com/insights/engineering_construction/mark_wiseman, diakses pada 23 Desember 2013).

Jika pembangunan infrastruktur mulai dilirik oleh para pengusaha besar sebagai bentuk investasi yang menguntungkan di tengah ketidakpastian dunia ekonomi saat ini, maka bagi beberapa sebagian besar pemerintahan di dunia, investasi infrastruktur oleh sektor swasta juga dianggap menguntungkan karena memperingan beban keuangan. Selain itu, pembangunan infrastruktur di wilayah yang tepat akan mendorong pembentukan kawasan ekonomi dan kawasan industri. Ini dianggap sangat vital untuk dapat memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara dan wilayah. Fahd Al Rasheed, direktur dan CEO dari The King Abdullah Economic City, yang dalam forum itu mewakili pandangan pemerintah, menganjurkan suatu model baru pembangunan infrastruktur menurut pengalaman Saudi Arabia:

> "Pemerintah Saudi Arabia memikirkan apa yang seharusya dikerjakan oleh pemerintah untuk sektor swasta di abad 21 ini. Dan pemerintahan kami telah melakukannya. Kini kota kami terdiri dari beberapa komponen. Pertama adalah pelabuhan, yang dalam bayangan kami, akan mengubah peta logistik global. Rute perdagangan akan berubah, rute pemberhentian, dan lain sebagainya. Pembangunan pelabuhan akan memberi dampak yang positif pada biaya transportasi dalam jangka panjang. Kota kami akan menjadi 10 pelabuhan terbesar di dunia... Yang kedua adalah kawasan industri yang akan menjadi industri padat-energi. Kami sedang berupaya menarik para investor, dan kami memiliki keunggulan kompetitif. Yang ketiga adalah pariwisata. Kami tahu kami tak bisa menyaingi Paris, Dubai dan New York, tetapi kami masih menjadi negara yang paling dikunjungi ke 17 di dunia, karena Haji dan Umrah bagi kaum muslim. Jadi, kami berupaya untuk melayani sebaik mungkin para pengunjung dan menyediakan mereka kesempatan berpariwisata di tengah pengalaman religius. Dan kemudian adalah perumahan... Kami perlu membangun empat juta unit perumahan dalam 20 tahun ke depan...kami menargetkan dua juta orang akan tinggal di kota ini. Ukuran kota ini akan sebesar Washington DC. dan pelabuhannya akan menjadi salah satu yang terbesar dari 10 pelabuhan besar di dunia...Jadi, ini akan menjadi saat yang menyenangkan bagi kami".
>
> (http://www.mckinsey.com/insights/engineering_construction/fahd_al-rasheed, diakses tanggal 23 Desember 2013).

Dalam skema MP3EI ini, infrastruktur memang telah menjelma menjadi bisnis dan industri. Dalam skema PPP yang dilakukan saat ini, bisnis infrastruktur ini terbagi menjadi 8 sektor bisnis utama:

1. Sektor air minum: meliputi pembangunan fasilitas untuk ekstraksi air mentah, jaringan penyaluran, jaringan distribusi air, dan instalasi pengelolaan air;
2. Sektor transporasi:pelabuhan, bandara, kereta api dan stasiun kereta api;
3. Sektor jalan raya: jalan tol dan jembatan tol;
4. Sektor kelistrikan: *power plant*, jaringan penyaluran dan distribusi listrik;

5. Sektor minyak bumi dan gas: pembangunan fasilitas pemrosesan, penyimpanan, penyaluran, dan distribusi;
6. Sektor pengelolaan limbah: instalasi pengelolaan limbah cair, pembuangan dan penyaluran;
7. Sektor irigasi: bendungan, fasilitas peyaluran air mentah;
8. Sektor telekomunikasi: jaringan telekomunikasi.
9.

Selama kurun waktu 2013 misalnya proyek pembangunan infrastruktur MP3EI menembus angka Rp. 459,9 triliun, yang terdiri dari Rp. 390 triliun untuk sektor konstruksi dan kelistrikan 64,9 triliun. Secara umum, pada tahun 2013-2015, proyek pembangunan infrastruktur yang dilakukan dengan skema *Public-Private Partnership* (PPP) adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Proyek Infrastruktur dengan Skema PPP 2013-2015

Sektor/Sub Sektor	Jumlah Proyek	Nilai Proyek (dalam USD)
Transportasi udara	4	1.354,00
Transportasi darat	3	136.00
Transportasi air	4	2.875,12
Rel KA	3	4.783,00
Jalan Tol	14	33.147,53
Water Supply	18	1.987,82
Sanitasi/TPA	6	453,00
Pembangkit Listrik	6	6.478,50
Jumlah	**58**	51.205,97

Tabel 5. Proyek Infrastruktur Prioritas

Infrastruktur	Jumlah Proyek	Nilai Proyek (Juta USD)
Bandara	1	214.00
Jalan Tol	13	32.519.53
Air Bersih	5	590.67
Sanitasi/TPA	3	150.00
Pembangkit Listrik	4	4.716.50
Jumlah	26	38.190.70

Sumber: Indonesia Infrastructure Initiatives

Dalam proyek MP3EI proyek-proyek infrastruktur tersebut didanai melalui bujet pemerintah, atau perusahaan-perusahaan negara, dari investasi sektor swasta, dan dari pendanaan donor bilateral maupun multilateral, termasuk dari dana negara-negara di wilayah Asia Timur. Pembiayaan dan pendanaan proyek-proyek pembangunan infrastruktur oleh MP3EI didapat melalui tiga jalur, yaitu memangkas subsidi-subsidi untuk rakyat yang dialihkan untuk pembiayaan infrastruktur; meningkatkan pendapatan negara melalui pajak; dan menambah hutang. Dari sekian opsi, pemangkasan subsidi rakyat dan penambahan hutang adalah jalur utama yang ditempuh oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

Selain itu, mekanisme lain yang ditempuh untuk membiayai banyaknya pembangunan infrastruktur dalam proyek MP3EI adalah melalui mekanisme *public-private partnership* (PPP). Secara umum, PPP didefinisikan sebagai "kontrak jangka panjang antara negara dan sektor swasta yang bertujuan untuk menyediakan infrastruktur publik". Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), misalnya mendefinisikan PPP sebagai "suatu persetujuan antara pemerintah dan satu atau lebih perusahaan swasta (yang bisa termasuk operator dan lembaga pemberi biaya) dimana sektor swasta yang menjadi mitra memberikan layanan publik yang juga bertujuan agar pihak swasta dapat mengambil keuntungan dalam layanan publik itu" (Rulliadi 2013: 1-2).

Menggantikan model pembangunan infrastruktur yang umumnya dilakukan oleh pemerintah melalui BUMN, mekanisme PPP mulai dikenalkan di Indonesia pada masa Reformasi dan semakin intensif pada 2005, ketika isu tentang *good governance* mulai mendapatkan tempat dalam diskursus reformasi politik dan birokrasi di Indonesia. PPP kemudian menjadi pendekatan baru dalam pembangunan infrastruktur yang dianggap segaris dengan semangat *good governance.* Artinya, negara mesti memberi kesempatan

yang lega bagi sektor swasta untuk turut terlibat dalam penyediaan layanan publik dan infrastruktur.

Penggunaan PPP sebagai mekanisme pembangunan infrastruktur sebenarnya merupakan resep dan anjuran Bank Dunia. Pada *World Development Report* tahun 1994 yang bertajuk "*Infrastructure for Development"*, Bank Dunia mengenalkan PPP sebagai instrumen pembangunan yang menyaratkan adanya perubahan dan transformasi peranan negara dalam pembangunan infrastruktur. Sebab menurut Bank Dunia pembangunan infratsruktur oleh negara dianggap tidak efisien, tidak responsif terhadap konsumen, dan penuh dengan korupsi. Atas asumsi itu, dengan maka Bank Dunia menganjurkan untuk memberikan tempat yang lebih luas bagi sektor swasta untuk turut membangun infrastruktur (Rulliadi 2013: 6).

Dalam kasus Indonesia, kini berbagai macam pinjaman, intervensi teknis dilakukan oleh berbagai macam lembaga keuangan internasional untuk membuat PPP bekerja di Indonesia seperti: Infrastructure Reform Sector Development Programme (IRSDP) yang dibiayai melalui pinjaman dan hibah oleh Asian Development Bank dan pemerintahan Belanda; Infrastructure Development Policy Loans (IDPL) yang disponsori oleh Bank Dunia; Indonesia Infrastructure Initiative (IndII) yang didorong oleh pemerintah Australia melalui AUSAID; serta JICA (Japan International Cooperation Agency) untuk program pengelolaan pembiayaan bersama. Beragam intervensi itu diorentasikan untuk mengubah kebijakan negara, reformasi institusi negara, dan merintis suatu *pilot project* untuk lembaga keuangan penjaminan infrastruktur (Rulliadi 2013: 9).

Ringkasnya, dengan skema PPP ini, negara dianjurkan untuk memainkan peranan yang lebih aktif dalam mereformasi dirinya, memfasilitasi dan memberi insentif pada pasar serta mengurangi keterlibatan BUMN dalam pembangunan infrastruktur. Meski demikian, bukan berarti peranan negara mengecil dalam pembangunan infrastruktur. Malahan, peranan negara bertambah besar utamanya untuk memfasilitasi agar bisnis infrastruktur dapat bekerja dengan sempurna. Untuk memperlancar pembangunan infrastruktur, misalnya, pemerintahan SBY mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2012 ketika UU Pengadaan Tanah bagi Pembangunan dianggap masih belum dapat mempercepat pembebasan lahan.

Sejak Februari 2010, pemerintah telah melakukan berbagai macam inovasi dan perombakan organisasi negara agar percepatan pembangunan infrastruktur dapat terjadi. Sejak tahun 2010, Kementerian Keuangan mendirikan sebuah BUMN yang bernama PT. SMI (Sarana Multi Infrastruktur) yang berfungsi sebagai katalisator bagi percepatan proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia. Kemudian, pada Agustus 2010, Kementerian Keuangan juga mendirikan PT. IIF (Indonesia Infrastructure Finance) agar pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia dapat dilaksanakan dengan skema PPP. PT. IIF ini didanai oleh PT. SMI, Asian Development Bank, The International Finance Corporation, dan DEG (Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft). Salah satu pemegang saham terbaru dari PT. IIF adalah sebuah bank Jepang yang bernama SMBC.

Selain itu, negara saat ini juga mengalokasikan suatu anggaran yang disebut dengan anggaran *land capping,* yang digunakan untuk mempercepat proses pembangunan jalan

tol yang terkendala pembebasan lahan di seluruh Indonesia. Dana *land capping* ini digunakan untuk sebuah proyek yang secara ekonomis dinilai layak, tetapi harga tanahnya terlalu tinggi. Pemerintah memberikan insentif dan bantuan melalui dana tersebut dari anggaran negara untuk membuat suatu proyek infrastruktur tersebut berjalan lancar. Selain itu, melalui kementerian keuangan negara membentuk sebuah BUMN yang disebut dengan Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF), yang juga diterapkan di beberapa negara seperti Brazil, Peru dan Kolumbia. IIGF dibentuk dengan fungsi sebagai suatu entitas yang menyediakan garansi keuangan bagi sektor swasta dan sebagai pengelola resiko fiskal dalam bisnis infrastruktur. Dalam suatu skema yang dibuat untuk pembangunan pelabuhan Cilamaya, misalnya, jelas terlihat bahwa pembangunan jalan tol dan pelabuhan itu digunakan utamanya untuk melayani perusahaan-perusahaan otomotif, serta berbagai kawasan industri di Jakarta, Bekasi dan Karawang.



Gambar 4. Rencana Proyek Pembangunan Pelabuhan Cilamaya.
Sumber: ERIA (2012: 2).

Dengan demikian, pembangunan ekonomi dunia saat ini memang menempatkan infrastruktur sebagai bisnis. Infrastruktur telah bergeser dari layanan publik yang disediakan oleh pemerintah untuk keselamatan dan kesejahteraan rakyat menjadi suatu bisnis infrastruktur dari negara atau swasta yang utamanya ditujukan untuk kepentingan industri. Kecenderungan semacam ini sebenarnya merupakan hasil dari prakarsa para kapitalis untuk mencari kemungkinan aktivitas bisnis yang menguntungkan di tengah krisis kapitalis; mempermudah aliran komoditas dan rantai pasokan; dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

IV.
Catatan Akhir: Menghapus warisan Buruk Rejim Sekarang

Sangat jelas bahwa MP3EI mendasarkan pada asumsi bahwa pasar global sebagai kesempatan emas. MP3EI adalah suatu kerangka pembangunan nasional yang mempercayai bahwa Indonesia harus menyadari posisinya dalam pembagian kerja ekonomi internasional, dan mengoptimasikan posisinya sebagai produsen dan pengeksport komoditas global yang berbasiskan sumber daya alam. Konsekuensinya tidak dibicarakan bahwa pasar global bisa menjadi kekuatan pemaksa yang mampu mereorganisasi dan merekonstruksi ruang geografis pedesaan, untuk pembukaan ruang-ruang baru bagi situs-situs produksi komoditas global yang dimulai dengan menghancur-lebur hubungan kepemilikan rakyat pedesaan dengan tanah, kekayaan alam, dan wilayahnya, dan segala hal-ihwal kebudayaannya yang hidup di atasnya dan melekat secara sosial pada tempat-tempat itu sebelumnya.

Ellen M. Wood (1994) membedakan *market-as-opportunity*(pasar-sebagai-kesempatan), dan *market-as-imperative* (pasar-sebagai-paksaan). Pasar sebagai kesempatan bekerja melalui proses sirkulasi barang dagangan. Kebutuhan manusia pada gilirannya dibentuk agar dapat mengkonsumsi apa-apa yang diproduksi. Sebagai suatu sistem produksi yang khusus, ia mendominasi cara pertukaran komoditas melalui pasar. Lebih dari itu, perusahaan-perusahaan raksasa sanggup membentuk bagaimana cara sektor ekonomi dikelola oleh badan-badan pemerintahan hingga ke pemikiran cara bagaimana cara ekonomi pasar itu diagung-agungkan. Sementara itu, pasar-sebagai-keharusan dapat dipahami mulai dari karakter sistem produksi kapitalis sebagai yang paling mampu dalam mengakumulasikan keuntungan melalui kemajuan dan sofistikasi teknologi, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja per-unit kerja, dan efisiensi hubungan sosial dan pembagian kerja produksi dan sirkulasi barang dagangan. Kesemuanya mengakibatkan penggantian pabrik-pabrik yang telah usang, sektor-sektor ekonomi yang tidak kompetitif, hingga ketrampilan para pekerja yang tidak lagi dapat dipakai.

Sebagai sistem produksi yang khusus, kapitalisme ini memberi tempat hidup dan insentif bagi semua yang efisien, dan menghukum mati atau membiarkan mati hal-hal yang tidak sanggup menyesuaikan diri dengannya. Selanjutnya, di atas apa-apa yang telah dihancurleburkan itulah dibangun sesuatu yang baru, yang dapat lebih menjamin keberlangsungan akumulasi keuntungan. Schumpeter (1944/1976:81-86) menyebut hal ini sebagai *the process of creative destruction* (proses penghancuran yang kreatif).

Saat ini merupakan momen yang sangat tepat untuk menghapus warisan buruk rejim ini: MP3EI. Bagaimana caranya? Pemimpin negara Indonesia di tahun 2014 memiliki kesempatan untuk mengambil jalan baru, belok dari jalan yang melanggengkan kedudukan Indonesia sebagai "*Een natie van koelies en een koelie onder de naties*", "*A nation of coolies and a coolie amongst nations*". Jalan baru itu musti dimulai dengan menyatakan berhenti dari segala cara pembangunan yang mengancam keselamatan rakyat, merusak produktivitas rakyat, menghancurkan layanan alam, dan membuat kesejahteraan rakyat merosot. Sebaliknya, seluruh elemen musti berbelok menempuh jalan baru bangsa ini, jalan yang mampu membalikan situasi krisis sosial-ekologis itu. Usaha memulihkannya dapat dimulai dari belajar dari satuan-satuan yang paling dasar,

yakni kampung-kampung, sekolah-sekolah, sanggar-sanggar kebudayaan, kelompok-kelompok studi lokal, kelompok-kelompok tani, komunitas-komunitas masyarakat adat, usaha-usaha ekonomi kecil, dan sebagainya, hingga satuan-satuan nasional, seperti partai politik, parlemen, senator, organisasi masyarakat sipil, universitas, dan sebagainya.

Para pemimpin di berbagai tempat itu musti menyadari kekeliruan jalan sebelumnya. Jalan yang membuat, sebagaimana diungkapkan dalam pidato Soekarno, "*Indonesia menjadi pasar penjualan barang-barang produk dari negara sana. Indonesia menfjadi tempat pengambilan bahan-bahan pokok bagi industriil, kapitalisme disana. Indonesia mendjadi investasi-gebied daripada modal asing*." Seluruh elemen harus leluasa untuk "menyusun masyarakat Indonesia merdeka yang gagah, kuat, sehat, kekal dan abadi", sebagaimana secara jelas dipidatokan oleh Ir. Soekarno di Badan Persiapan Usaha-usaha Kemerdekaan 1 Juni tahun 1945, setelah memaknai kemerdekaan Indonesia sebagai "jembatan emas".

Bangsa ini tidak dapat mencapai cita-cita mulia kemerdekaan itu dengan hanya melanjutkan cara-cara penyelenggaraan negara di masa lalu, yang ternyata hanya sanggup melanjutkan Indonesia sebagai: pertama, menjadi "pasar penjualan daripada produk-produk negeri pendjadjah atau negeri-negeri luaran di tanah air kita"; kedua, "Indonesia mendjadi tempat pengambilan bahan-bahan pokok bagi industriil kapitalisme di negeri pendjadjah atau negeri-negeri lain", dan ketiga, "Indonesia mendjadi tempat investasi daripada modal-modal pendjadjah dan modal-modal asing jang lain". Betapa benar yang disampaikan oleh Presiden Soekarno pada sidang pleno pertama Dewan Perantjang Nasional (1959) di Istana Negara, 28 Agustus 1959! []

Daftar Pustaka

de Angelis, Massimo. 2007. *The Beginning of History: Value Struggles and Global Capital.* London: Pluto Press.

ERIA. 2009. *Comprehensive Asia Development Plan.* ERIA: Jakarta

ERIA. 2010. "Comprehensive Asia Development Plan and Beyond-Growth Strategies to More Prosperous East Asia". ERIA Policy Brief no. 2010-02, October 2010.

ERIA 2012. "The Proposed Cilamaya New International Port is a Key for Indonesian Economic Development: Geographical Simulation Analysis" *Policy Brief*, *No. 2012-05, December 2012*

Hadi, Syamsul, Salamuddin Daeng, Afrimadona, Shanti Darmastuti, Eka Pratiwi, Indah Nataprawira. 2012. *Kudeta Putih: Reformasi dan Pelembagaan Kepentingan Asing dalam Ekonomi Indonesia.* Indonesia Berdikari: Jakarta

Hadiz, Vedi. R. 2006. *Empire and Neoliberalism in Asia.* New York: Routledge.

Harvey, David. 2007. *A Brief History of Neoliberalism*, Oxford: Oxford University Press.

Harvey, David. 2009. *Imperialisme Baru*, *Genealogi dan Logika Kapitalisme Kontemporer*. Yogyakarta: Resist Book dan Institute of Global Justice.

Harvey David. 2010. *Enigma of Capital and The Crisis of Capitalism.* London: Profile Books

Hiariej, Eric, 2005. *Materialisme Sejarah Kejatuhan Soeharto.* Yogyakarta: IRE.

_____ "Formasi Negara Neoliberal dan Kebangkitan Komunalisme" dalam *Jurnal Mandatory* Edisi 4/Tahun 4/2008.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2011. *Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia.* Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Mc Nally, David. 2009. "From Financial to World Slump: Accumulation, Financialization and Global Slow-down" dalam *Historical Materialism 17.*

Pontoh, Coen Husain, 2007. *Malapetaka Demokrasi Pasar*. Yogyakarta: Resist Book.

Rulliadi, Dudi. 2013. *Guaraentee Fund in Indonesian Public-Private Partnership:International Design as Domestic Innovation.* Paper dipresentasikan dalam Conference on 'Innovation in Governance of Development Finance: Causes, Consequences and the Role of Law', Institute for International Law and Justice, New York University School of Law, 8-9 April 2013.

Setiawan, Bonnie. 2014. ""Strategi Pembangunan dan Industrialisasi di Indonesia". Bahan diskusi tidak diterbitkan.

Urata, Shujiro. 2008. "An ASEAN + 6 Economic Partnership: Significance and Tasks" dalam *Asia Research Report 2007.*

Umezaki, So. 2011. "Infrastructure in Indonesia and The Way Forward" dalam http://www.hitachi-hri.com/research/organ/pdf/vol6_1_6.pdf, diakses pada 13 Januari 2014.

Wood, Ellen Meiksins. 1994. *(1994).* 'From Opportunity to Imperative: The History of the Market'*, Monthly Review, 46 (3).*

http://ramadhan.detik.com/read/2013/07/05/125343/2293612/4/perusahaan-top-500-china-minat-investasi-di-indonesia, diakses pada 13 Januari 2014.
http://kp3ei.go.id/uploads_file/buletin/Bulletin_KORIDOR_Edisi_Perdana-2013.pdf, diakses pada 14 Januari 2014.
http://jakarta.usembassy.gov/news/pr_08092012.html, diakses pada 13 Januari 2014.
http://setkab.go.id/en/mp3ei-3938-27-regulasi-telah-diterbitkan-untuk-sukseskan-mp3ei.htm, diakses pada 20 Januari 2014
http://www.mckinsey.com/insights/engineering_construction/fahd_al-rasheed, diakses tanggal 23 Desember 2013
http://www.mckinsey.com/insights/engineering_construction/mark_wiseman, diakses pada 23 Desember 2013

Sajogyo Institute

Jl. Malabar No. 22, Bogor,
Jawa Barat 16151
Telepon/Fax : (0251) 8374048
Email: eksekutif.sains@gmail.com
Situs maya: http://www.sajogyo-institute.or.id

ISSN Digital

ISSN Cetak